



Volume 6 (2) (2022): 119-126

The Indonesian Journal of Social Studies

Available at <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpips/index>

IRIGASI DAN PENDIDIKAN POLITIK ETIS DI KOTA METRO

Adi Kurniawan¹, Anindya Prameswari², Yustina Sri Ekwandari³

Program Studi Pendidikan Sejarah

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35141

* e-mail: adikece999@gmail.com, anin.prameswari04@gmail.com, yustina.sriekwandari@fkip.unila.ac.id

Abstrak

Dalam kajian penelitian penulis memfokuskan kepada peninggalan-peninggalan di kota Metro saat masa penerapan politik etis di era kolonial dan pengaruhnya pada masa kini. Pemberlakuan politik etis di Kota Metro sudah dimulai sejak tahun 1905. Dengan pemerataan seluruh masyarakat Jawa menuju wilayah-wilayah yang kurang padat penduduk salah satunya Provinsi Lampung. Terkhusus Kota Metro yang didukung dengan pidato dari Ratu Wilhelmina yang mendeklarasikan sebuah kebijakan baru yang akan diterapkan di kawasan lahan kekuasaan atau wilayah penjajahan. Dengan kehadiran kebijakan baru inilah yakni Penerapan Politik Etis yang dikenal dengan slogannya berupa "edukasi, irigasi, dan emigrasi", biasa dikenal dengan Trilogi van Deventer atau sebutan Trias Etika. Walaupun ingin menyamaratakan populasi disini, pemerintah kolonial melakukan dukungan terhadap kaum kapitalis serta industrialis dan membiarkan pribumi mandiri. Pemerintah kolonial membangun irigasi ke daerah perkebunan-perkebunan milik swasta, serta pendirian instansi pendidik dengan mengolompokkan ke dalam bangsawan dan sipil. Ketimpangan terjadi di segala aspek kehidupan masyarakat pribumi. Namun berbeda dengan keberhasilan yang diraih akibat pemberlakuan politik etis di Kota Metro, terlihat bahwa sistem irigasi dan sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, Kota Metro dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan peninggalan-peninggalan baik dari sistem pendidikannya dan irigasinya yang berjalan dengan baik hingga kini.

Kata Kunci: kota Metro, pendidikan, prasarana, kebijakan politik etis, sejarah

Abstract

In this study, the research focuses on the relics in the city of Metro during the application of ethical politics in the colonial era and its influence in the present. The implementation of ethical politics in Metro City has been started since 1905. By equalizing all Javanese people towards less densely populated areas, one of which is Lampung Province. In particular, Metro City, which was supported by a speech from Queen Wilhelmina, who declared a new policy to be implemented in the jurisdiction or area of application. With the existence of this new policy, namely the Application of Ethical Politics, known as the slogan of "education, irrigation, and emigration", which is commonly known as the van Deventer Trilogy or Trias Ethics. Despite wanting to present the population here, the colonial government supported the capitalists and industrialists and left the natives independent. The colonial government irrigated the areas of privately owned plantations, and built educational institutions by classifying them into aristocrats and civilians. Inequality occurs in all aspects of indigenous people's lives. However, unlike the success achieved due to the implementation of ethics in Metro City, it can be seen that the irrigation system and education system can run well. Thus, Metro City can provide an overview of the legacy policies both from its education system and its irrigation system which has been running well until now.

Keywords: Metro city, education, infrastructure, ethical political policies, history



PENDAHULUAN

Provinsi Lampung memiliki dua kota, yaitu Kota Metro dan Bandar Lampung. Kota Metro sendiri diawal pendiriannya diliputi oleh adanya kolonisasi. Kemudian baru dibentuk sebuah induk dari sebuah desa baru yaitu Trimurjo. Wilayah Trimurjo sendiri merupakan wilayah Marga Nuban. Pada mulanya daerah ini sangatlah terisolasi akibat kurangnya pengaruh penduduk asli Lampung. Di awal tahun 1936 Pemerintah Belanda mulai melakukan beberapa kebijakan baru dengan mengirimkan migran orang-orang diluar daerah Sumatera akibat dari pemberlakuan politik etis. Dalam waktu yang sama, Pemerintah kolonial Belanda akhirnya mendirikan infrastruktur seperti jalan-jalan, klinik kesehatan, serta adanya kantor polisi, kantor pos, pasar, dan tempat penginapan, serta pemasangan listrik, dan juga membangun jalur irigasi. Hal ini, dalam pembangunan infrastruktur tentunya dapat dijadikan contoh oleh daerah-daerah lain di Provinsi Lampung. Kota Metro sendiri dibawah pengaruh kolonialisme tentunya terlibat dalam mengadakan berbagai peraturan di tempat pemukiman, tempat pertanian, tempat dagang, lalu hubungan yang memiliki jaringan jalan raya, serta saluran irigasi, adanya lapangan, taman-taman, dan juga rute jalur pembuangan untuk air hujan. Maka bisa dijelaskan dengan kata lain, sebuah pemerintahan yang dimiliki Belanda telah menggariskan "land use planning" daerah.

Dengan berjalannya waktu, kota Metro dijadikan sebagai sebuah pusat akan sebuah pemerintahan dari Kecamatan Kota Metro dan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian statusnya berkembang menjadi Kota Administratif. Namun, jika dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), Pieter Brooshooft dan C. Th. Van berargumen "bahwasannya pemerintah Belanda sebenarnya sudah mengambil lebih banyak keuntungan dari daerah jajahan, sementara rakyat pribumi selalu menderita berupa hutang kehormatan yang harus dilunasi".

Perlu diketahui terdapat perluasan akses pendidikan sampai ke Lampung dengan semakin gencarnya kebijakan politik etis pemerintah Belanda di tahun 1905. Kebijakan kolonialisasi di berbagai daerah di Lampung menyebabkan perubahan pola pikir pemerintah yang awalnya pemerintah sebagai prasyarat utama dalam mendirikan sekolah berubah menjadi pendirian sekolah, hal ini disebabkan atas prakarsa masyarakat (sekolah desa).

Menilik dari tujuan pemerintah kolonial untuk menerapkan politik etis, tentunya membawa salah satu hal yang positif dalam perkembangan masyarakat. Seperti, masyarakat bisa belajar membaca dan menulis serta paham akan pendidikan di Indonesia. Hal ini, tentunya membawa hal yang positif karena masyarakat Indonesia mulai terbuka mengenai wawasan akan Pendidikan yang penting di Indonesia. Maka dari permasalahan mengenai bagaimana bisa kota Metro dijuluki sebagai kota pelajar. Selain itu, pengaruh kebijakan politik lainnya yaitu terdapat prasarana seperti irigasi yang dibangun oleh pemerintah Belanda, dan hingga kini irigasi tersebut digunakan untuk mengairi persawahan. Maka dari itu, disini kami tertarik untuk mengkaji mengenai penerapan kebijakan politik etis terhadap peninggalan prasarana dan pendidikannya di Kota Metro.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah skenario pelaksanaan penelitian yang dijalankan (Darmalaksana, 2020). Metode dalam penulisan ini memaparkan secara teknis mengenai metode yang digunakan dalam proses penelitian. Ada bagian yang terlebih dahulu diterangkan

mengenai hal yang akan memengaruhi isi dari penelitiannya. Pada hal ini, jenis penelitian yang digunakan penulis, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Sifat dari penelitian ini bertujuan untuk bisa mendeskripsikan mengenai hal yang diteliti. Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu diawali dengan pemilihan topik, heuristik, interpretasi, dan yang terakhir yaitu historiografi.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian. Dan saat ini, penulis menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Biasanya metode kualitatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber tertulis yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji. Adapun tujuan dari studi literatur ini yaitu untuk membangun dan mengontruksi konsepsi secara lebih kuat dengan memanfaatkan sumber pustaka yang digunakan untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil data yang berasal dari sumber data lapangan terdahulu, yaitu sumber data yang sudah pernah diteliti dan diperoleh dari jurnal atau buku mengenai penelitian Kebijakan Politik Etis terhadap peninggalan prasarana dan pengaruh pendidikan di Kota Metro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Metro

Pengertian Politik Etis

Sebuah argumen sempat keluar dari mulut Van Deventer yang dijelaskan di dalam sebuah bukunya berjudul "Utang Kehormatan" sebagai tanda awal dibentuknya Politik Etis atau dikenal juga dengan politik balas budi, sebagai bentuk kritikan atas tindakan Belanda akan kekejamannya berupa pemberlakuan tanam paksa. Selanjutnya Ratu Wilhelmina menyerukan akan membuat sebuah kebijakan dengan politik etis dengan sebutan Trias Van Deventer yang meliputi: irigasi, emigrasi, dan edukasi.

Politik etis sendiri ialah sebuah politik balas budi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menetapkan sebuah kebijakan politik etis (irigasi, migrasi, dan edukasi). Di bidang irigasi Belanda melakukan pembangunan irigasi yaitu untuk mengairi perkebunan-perkebunan Belanda. Selain itu, emigrasi juga diterapkan yaitu dengan memindahkan masyarakat ke perkebunan Belanda, untuk melakukan kerja rodi. Sedangkan di bidang edukasi sendiri mereka mendidik kalangan priyayi sampai mereka memiliki budaya Belanda dan mereka dijadikan sebagai kaki tangan Belanda dalam memerintah rakyat. Penerapan Politik Etis sendiri sudah dimulai sejak tahun 1901, bersamaan dengan Ratu Wilhelmina yang menyampaikan pidato tahunannya. Dengan maksud mensejahterakan rakyat Indonesia sekaligus sebagai awal baru kemajuan masyarakat Indonesia (Nasution, 1983: 15). Menurut Ricklefs, (2007: 325-326), penduduk pribumi hanya berfokus pada proyek infrastruktur saja. Namun, tidak selalu proyek tersebut berhasil, dalam hal ini Pemerintah Belanda dinilai gagal dalam membuat kebijakan dalam mendorong industrialisasi di Indonesia. Masih banyak sekali kritik yang ditunjukkan kepada Belanda, dimana Belanda masih dinilai hanya mementingkan usahanya dalam mempermudah pelaksanaan politiknya saja (Ismawati, Dwi Nur, dkk, 2017: 284-285).

Meskipun begitu, masih banyak pihak yang merasa Pemerintah Kolonial mendukung akan adanya kebijakan tersebut, seperti yang diungkapkan dalam buku Max Havelaar (1860). Masih banyak juga suara dari pihak Belanda yang mendukung akan gagasan pengurangan penderitaan terhadap penduduk Jawa yang tertindas (Galih, Dhimas Rangga & Artono, 2017: 752). Hal tersebut juga telah dipertegas dengan pernyataan dalam pidato yang disampaikan oleh Ratu Wilhelmina (1901), yang menyatakan pemerintah kolonial Belanda akan memperbaiki

nasib masyarakat pribumi melalui tiga kebijakan politik etis, yakni memperluas pendidikan (education), perpindahan penduduk (emigrasi), dan juga pengembangan pertanian (irigasi). Kebijakan ini sering disebut pula sebagai kebijakan politik etis (Karsiwan & Sari, 2021: 4).

Pada dasarnya politik etis menganut tiga hal dalam menjalankan kebijakannya sendiri berupa tiga program yakni berupa pembangunan irigasi, edukasi dan emigrasi. Dalam hal ini masyarakat Jawa mendapat perhatian khusus, lalu diikuti dengan wilayah-wilayah pedesaan diluar Jawa dengan memperhatikan soal irigasi, pertanian, perbaikan jalan-jalan, kredit pertanian dan meningkatkan kemajuan Industri (Panders, 1900-1942).

Kebijakan Infrastruktur Pemerintahan Kolonial

Kebijakan pemerintah kolonial diawali dengan melakukan konektivitas antara daerah pesisir dengan daerah pedalaman, ditandai dengan dibangunnya jalan pos besar (*De Grote Postweg*) Anyer-Panarukan, serta jalur kereta api. Dengan begitu daerah-daerah yang ada di pedalaman mulai tersentuh, sehingga arus barang, jasa, dan manusia semakin lancar. Pernyataan tersebut di dukung oleh Passchier (2007). Bahwa fase arsitektur di Indonesia sudah dimulai penerapannya seperti kebijakan *cultuurstelsel* dan upaya yang dilakukan demi mendukung kebijakan ini yakni dengan dibangunnya *De Grote Postweg* serta dilanjut dengan jalur kereta api. Pembangunan ini semakin pesat akibat diberlakukannya kebijakan politik etis, kemudian disusul dengan pemberlakuan *Agrarischewet* atau dikenal dengan Undang-Undang Liberalisasi Agraria, dan juga *Decentraliewet* yang berupa penerapan politik dan undang-undang dalam berkorelasi terhadap meningkatnya sektor industri, pertanian, perkebunan, maupun sektor lainnya (Soekiman, 2011).

Pada masa politik etis, terlihat Belanda membalas kebaikan Indonesia dengan memberi trilogi atau trias politik. Meskipun, sebenarnya mereka tidak melakukannya dengan baik. Terlihat dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang dilakukan demi mengurangi beban pribumi, pada nyatanya hanya melakukan dukungan terhadap kalangan kaum kapitalis dan industrialis. Hal ini dapat ditunjukkan dari bagaimana pemerintah Belanda dalam membangun irigasi yang hanya di bangun untuk mengairi perkebunan swasta Belanda dan mengabaikan yang lainnya, sehingga hal tersebut hanya mensejahterakan pihak Belanda saja dan masyarakat pribumi itu dirugikan.

Politik etis sendiri diselenggarakan dengan tetap dibawah komando Belanda, oleh karenanya pada saat Ratu Wilhelma (1890-1948) mengumumkan bahwa taraf kesejahteraan masyarakat pribumi sangat terpuruk setelah dijajah selama bertahun-tahun. Setelah Ratu Wilhelma berpidato, maka akhirnya politik etis resmi dimulai, dan hal ini menjadi tanda awal kebangkitan masyarakat Indonesia (Nasution, 1983:15). Pergerakan ini dimulai pada abad ke-19, dimanasebagian masyarakat Belanda mulai memperhatikan kehidupan masyarakat pribumi. *K. E. Holle* merupakan tokoh kebangsaan Eropa yang mau mengulurkan tangannya terhadap nasib pribumi dan kemudian diikuti dengan banyak tokoh lainnya yang juga mengulurkan tangannya di berbagai sektor:

1. K. E. Holle memberi bantuan langsung dibidang pertanian terhadap masyarakat sunda dan ia juga berusaha melakukan perbaikan pada saat keadaan negeri serta masyarakat Hindia-Belanda.
2. C. Snouck Hurgronje memberikan sebuah konsep mengenai cara mendidik serta memberikam pendidikan kepada masyarakat pribumi, dan mengajarkan konsep pengairan untuk pertanian, serta konsep dalam pelaksanaan perpindahan penduduk.
3. W. P. D. de Wolff van Westerrode merupakan seorang pencetus nilai-nilai yang mendasar dari pengelolaan Bank Kredit dalam melakukan aktifitas ekonomi dengan mengaju pada sistem simpan dan pinjam serta pertanian, sehingga dalam menyelenggarakan sebuah

kebijakan yang fungsinya sendiri melindungi masyarakat akan kepemilikan hutang-hutang (Niel, 1984: 60).

4. Abendanon, membantu dalam pembangunan sekolah-sekolah guna menghasilkan pegawai pemerintahan yang kemudian diberikan sebuah penamaan dengan sebutan OSVIA (*Opleidingscholeeh Voor Inlandsche Ambtenaren*) yang adalah sebuah instansi pendidik dalam melakukan latihan bagi para petinggi-petinggi yang berada di pribumi (Galih, Dhimas Rangga & Artono, 2017:757).

Lampung tercatat sebagai salah satu wilayah yang kemudian dijadikan tempat selanjutnya yang berdampak akan kebijakan politik etis. Hal itu akibat dari aktivitas pemerintaan masyarakat ke kawasan Jawa menuju keluar pulau Jawa, dan penempatan imigran yang pertama di Lampung terjadi di wilayah Gedong Tataan yang sekarang disebut dengan kawasan Kabupaten Pringsewu (Sudarno, 2018). Perlu kita ketahui bahwa upaya dalam memperluas daerah kolonisasi terus dilakukan pada tahun-tahun berikutnya, seperti kawasan daerah Wonosobo, Gedong Dalem, Sukadana, serta daerah-daerah yang lain, yang tersebar di kawasan Lampung ini. (Amboro et al., 2018; Kuswono et al., 2020; Sjamsu, 1960).

Salah satu bukti pemberlakuan akan kebijakan politik etis berupa pemberlakuan diantaranya yakni membangun irigasi. Irigasi sendiri merupakan sebuah bangunan yang sengaja dibangun demi berjalannya kebijakan politik etis tersebut di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa dilaksanakan secara bersamaan serta beriringan dan juga selaras dari pemberlakuan kebijakan yang berupaya untuk menyamaratakan penduduk dengan menyebar penduduk Jawa yang terkesan padat ke daerah jarang penduduk, yang hingga terbilang pada masa sekarang bekas jejaknya dalam pembangunan sebuah irigasi. Hingga sampai saat ini masih dapat ditemukan (Karsiwan et al., 2013; Karsiwan & Pujiati, 2018), serta dampak akan kolonisasi pada wilayah Sukadana yakni terdapat Bendung Argoguruh 1935. Irigasi ialah faktor yang amat penting di dalam sebuah kegiatan perniagaan dalam lingkup pertanian yang selaras dengan kegiatan otonomi daerah. Irigasi sendiri dijelaskan sebagai sebuah upaya dalam penyaluran air, baik secara alamiah maupun buatan dari tanah yang ditujukan mampu melembkan bagi berlangsungnya pertumbuhan sebuah tanaman (Acmadi, M. 2013). Secara umum sistem Irigasi ini pada umumnya memiliki tujuan, secara garis besar tujuannya digolongkan menjadi dua tipe yaitu berupa:

1. Tujuan secara langsung, disini bermaksud supaya irigasi langsung mampu membasahi tanah dan ini memiliki hubungan yang sangatlah erat akan daya tampung air itu sendiri serta udara yang berada di permukaan tanah, agar mampu mencapai sebuah pengkondisian yang baik agar diharapkan, dapat pas dengan takaran yang dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman.

2. Tujuan tidak langsung, supaya bertujuan mampu mengatur suhu dari si tanah tersebut, dengan cara mencuci tanah yang terdapat racun di dalamnya, kemudian untuk mengangkat bahan pupuk, dengan melewati air yang ada, serta menaikan muka air ke tanah, sehingga hal tersebut mampu meningkatkan elevasi dengan cukup mengaliri air lalu diendapkan melalui lumpur yang akhirnya terbawa air.

Pengenalan sistem irigasi sendiri sudah di perkenalkan pada abad ke-19 tepatnya di tahun 1999. Terjadi sebuah perubahan besar-besaran akibat munculnya sebuah reformasi dibidang sumber daya air. Hal tersebut didukung oleh Bank Dunia bernama WATSAL. Dengan menawarkan manajemen sumberdaya air dan juga manajemen layanan. Namun, dengan berbagai alasan di tahun 1998, kebijakan tersebut beralih menjadi kebijakan dibidang irigasi dengan nama *Irrigation Operation and Maintenance Policy (IOMP)*. Sehingga pada akhirnya membuahkan sebuah hasil melalui kebijakan (policy dialogue) antara Indonesia dengan Bank Dunia serta ADB dengan tujuan prakondisi dalam memperoleh pinjaman dana baru di bidang irigasi (Ardi,2013).

Media penyedia air sendiri berasal dari air hujan, yang kemudian menggenang yang semakin banyak yang kemudian terjadi banjir dari sebuah sungai yang meluap, maka upaya yang dilakukan akan sebuah bencana alam ini, diperlukan sebuah teknologi berupa pengelolaan air tersebut. Dan juga mampu menyimpan air dikala kemarau, kemudian hal tersebut tak lama diikuti oleh sebuah rekayasa teknik dalam skala lumayan besar, yang dikenal dengan sebuah irigasi buatan, kemudian dibagi kembali menjadi bagian irigasi pompa, yang mana air dari sumber air yang letaknya paling rendah menuju ke tempat yang paling tinggi melalui manual maupun mekanis, setelah itu air tersebut dialirkan ke lahan-lahan pertanian dengan menerapkan sebuah unsur gravitasi dari sumber pengambilan air. Upaya untuk menunjang sebuah proses produksi pertanian melalui sumber air sangat perlu untuk di distribusikan baik secara teknis maupun sistematis. Sistem irigasi juga memiliki berbagai manfaat, diantaranya, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya dalam membasahi tanah, maka dengan begitu tanah yang berada di daerah dengan curah hujan rendah atau kemarau, mampu terus di alirkan sebuah air.
2. Supaya dapat mengatur proses pembasahan tanah, supaya daerah pertanian ini mampu selalu mendapatkan air sepanjang saat apabila dibutuhkan, di segala musim (musim hujan atau kemarau)
3. Upaya dalam menyuburkan tanah, hal tersebut perlu dilakukan agar air yang mengandung lumpur dan unsur hara yang baik dalam menyuburkan tanaman agar mudah didapatkan, walaupun daerah pertaniannya sendiri gersang dan sangat membutuhkan sebuah penyubur.
4. Lalu yang terakhir manfaat atau fungsi dari sebuah sistem irigasi ini, mampu meninggikan tanah yang sangat rendah dalam kurun kawasan rawa yang terendam lumpur dengan mengandung air yang sangat tinggi yang oleh air irigasi ini sendiri (Rachmad, 2009).

Penerapan Kebijakan Politik Etis Terhadap Prasarana Infrastruktur Kota Metro

Pada awalnya pembangunan kota Metro sendiri dirancang sebagai *gemeente* (kotamadya) di bawah *Afdeeling* tepatnya di daerah Sukadana Karesidenan di Provinsi Lampung sendiri sudah mencakup luas wilayah sekitar 55.000 hektar, yang dipimpin oleh asisten kerisedanan diantaranya kerisedanan Trimurjo, Kerisedanan Metro, Kerisedanan Pekalongan, dan Kerisedanan Batanghari-Sekampung (Amboro, 2021 dan Kuswono et al.,2020). Sementara menurut kosmologi pola tata ruang di kota Metro mengadopsi unsur Gatra Tunggal atau Catur Sagotrah, yang mencakup sektor-sektor kehidupan masyarakat antara lain ekonomi, politik, religius, dan masyarakat, yang diabadikan kedalam infrastruktur bangunan berupa kantor, pasar, masjid, dan alun-alun (Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi DI Yogyakarta, 2019).

Saat itu semangat politik etis sangat besar, sehingga kebijakan politik etis ini terus gencar dilakukan, guna terus ditingkatkan demi dapat mensejahterakan penduduk dalam program pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendirian sekolah pun semakin banyak di Hindia Belanda, yang merupakan penyebab dari kebijakan politik etis. Tahun 1892 sebelum politik etis, Diawali dengan pembangunan berupa sekolah bagi masyarakat pribumi berkat W.P Groenevelt, selaku Direktur Pengajaran Agama dan Industri (Nasution, 1983). Mereka membangun sekolah kelas satu dan sekolah kelas dua. Dimana anak- anak kaum bahan ada di sekolah kelas satu dengan masa belajar sekitar 5 tahun dengan memakai kurikulum sekolah yang sama seperti sebelum tahun 1892 sifatnya secara teknis, seperti kegiatan membaca, menulis, berhitung serta menggunakan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran pada tahun 1907 (Fakhriansyah & Patoni,2019: 127).

Pada keresidenan Lampung, pelaksanaan kolonisasi pertama dilaksanakan dengan menggunakan ujicoba penempatan pada bagian pada daerah Bagelen (1905), dilanjut Wonosobo (1922), Trimurjo (1932), dan Sukadana (1932). Kemudian masyarakat di Jawa dipindahkan melalui jalur laut, baru setelahnya melakukan riset pendataan dan juga pengecekan kesehatan calon kolonis. Kolonis dari Jawa datang ke Lampung dengan menaiki kapal melalui pelabuhan yang ada di kawasan Panjang letaknya sendiri berada dikawasan pada bagian daerah pesisir selatan daerah Lampung, dekat ibukota Karesidenan Lampung (Karsiwan dan Sari, 2021: 4). Pada saat itu dibangun juga sebuah pusat pemerintahan induk desa yang dikenal dengan nama Trimurjo, yang merupakan awal sejarah kelahiran Kota Metro. Sebagian pemerintah kolonial yang didatangkan dari pusat pemerintah Hindia Belanda (1934-1935) ditempatkan pada desa yang dibangun ini. Pada masa pelaksanaan dampak dari sebuah kolonisasi tentunya berdampak selain Metro, terbentuknya sebuah onder di dalam distrik yakni seperti Pekalongan, Batanghari, Sekampung, juga Trimurjo. Kelimanya merupakan sebuah onder dalam sebuah distrik tersebut menerima perencanaan dalam keinginannya hendak mengalirkan air secara teknis yang bersumbernya sendiri berasal dari Way sekampung, dimana dalam proses penyelenggaraanya sendiri dilaksanakan tanpa campur tangan rakyat pribumi melainkan para tangan-tangan pihak koloni belanda yang telah lama tinggal pada onder didalam distrik biasa disebut bahkan diklaim bedeng-bedeng. Yang bermula sejak lama, hingga jumlahnya sudah mencapai sekitar sebanyak 45 Bedeng 1 bertempat pada daerah Trimurjo, serta Bedeng 67 bertempat pada Sekampung, hingga dalam perkembangannya akhirnya diberinama dengan, Bedeng 21, Yosodadi (Utama, 2019: 55-56).

Penerapan kebijakan politik etis dengan didirikannya bangunan sekolah- sekolah bagi anak-anak pribumi memberikan dampak bagi masyarakat sebagai tanda awal kemunculan pergerakan perjuangan di Indonesia. Meskipun, dalam pelaksanaannya yang diperbolehkan menempuh pendidikan hanya anak-anak dari para elit pribumi, akan tetapi selanjutnya para anak elit pribumi mulai bermunculan ke permukaan yang dikenal sebagai kaum intelektual tugasnya yaitu membantu atas nasib bangsa yang mengalami nasib yang malang. Maka dengan kesadaran dan akan pentingnya pendidikan, akhirnya para pemuda di Indonesia membentuk sebuah wadah organisasi dalam upayanya mewujudkan kemerdekaan melalui pergerakan nasional, diantaranya seperti: Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Partij, dan Perhimpunan Indonesia. Hal ini merupakan yang menjadi awal dari gagasan perlawanan yang dilakukan oleh pemuda kala itu (Susilo & Isbandiah, 2018: 410).

Pengaruh politik etis pada Kota Metro yang awalnya merupakan wilayah migrasi dari penduduk Jawa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, sekarang ini menjadi kawasan Kota Pendidikan dengan pusat pendidikan berada di kawasan kampus dan tersedia di seluruh wilayah kota metro, sehingga pada masa sekarang Metro sendiri mempunyai 12 perguruan tingkat tinggi dengan total jumlah sebanyak 183 sekolah yang dimulai dengan semua jenjang. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga yang sifatnya mendidik secara non-formal lainnya, dalam hal ini kota Metro sendiri sudah mempunyai sebuah gudang ilmu pengetahuan berupa perpustakaan. yang mana perpustakaan tersebut cukuplah representatif, ditambah dengan tempatnya sangatlah mudah dijangkau bagi sebagian masyarakat yang ada disana sehingga dengan begitu sangat mudah dalam menunjang kegiatan para peserta didik serta penduduk sekitar yang hendak berkunjung ke perpustakaan tersebut, yang namanya dikenal dengan perpustakaan dan kearsipan daerah kota Metro (Utama, 2019: 63).

Selain itu, pengaruh dari kebijakan politik etis di kota Metro yang bisa semua kita bisa rasakan sampai sekarang yakni dari prasarana irigasinya. Karena hingga sekarang sistem irigasi tersebut tetap berjalan baik hingga sekarang sebagai media pengairan perairan air, dimana sistem irigasi ini dimanfaatkan oleh para masyarakat umum untuk mengairi lahan pertanian mereka dan untuk memasok ketersediaan air ketika terjadi musim kemarau.

SIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa kolonial ialah sebuah artikel yang didasarkan pada pemikiran Van der Venter. Van der Venter yang percaya bahwa Belanda berterima kasih kepada Indonesia, karena pada masa penjajahan Belanda, keuntungan dan kemakmuran yang diperoleh ialah hasil kerja keras dan pengabdian penduduk setempat. Kebijakan politik etis dari Belanda dalam membangun sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi merupakan sebuah langkah awal dalam perjuangan pemuda Indonesia. Kota Metro terkenal sebagai kotanya para pelajar di Provinsi Lampung ini, diidentitaskan dengan Lampung yang dapat dilihat dari semangat pelajarnya untuk menuntut ilmu. Berkembangnya hal ini pula, politik etis menjadi salah satu faktor terhadap berkembangnya Pendidikan di Lampung ini, salah satunya di Kota Metro. Selain itu, penerapan kebijakan politik etis juga memberikan peninggalan prasarana berupa saluran irigasi, yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, dimana salah satu manfaatnya mereka bisa dengan mudah mengairi lahan pertaniannya. Maka penerapan kebijakan politik etis ini membawa pengaruh yang baik juga terhadap kota Metro, dimana hingga kini kita bisa rasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Acmadi, M. 2013. *Irigasi di Indonesia*. Media Press. Yogyakarta.
- Aman. 2007. *Sejarah Indonesia abad ke-19 Penarapan dan Dampak Sistem Tanam Paksa 1870*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.
- Anne Booth. William J.O Malley, Anna Weidemann (ed). 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Affandi, Alifa N dkk. (2020) Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial Di Hindia Belanda Tahun /1900-/1930. *Jurnal Artefak*. 7(1). 21-30.
- Ardi. 2013. Hasil Besar Dari Irgasi Kecil. *Koran Harian Media Indonesia*. Jakarta.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre- Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fakhriansyah, M., & Patoni, I. R. P. (2019). Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode Etis (1901-1930). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 122-147.
- Ilham, Virio dkk. (tanpa tahun). Tinjauan Historis Kolonisasi Di Metro Tahun 1937. *Jurnal FKIP Unila*. 1-12.
- Karsiwan & Sari, Lisa Retno. (2021).Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda Pada Masa Politik Etis Di Lampung. *Jurnal Artefak*. 6(1). 1-16.
- Karsiwan, K., & Sari, L. R. (2021).Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Politik Etis di Lampung. *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 6(1), /1-16.
- Racmad, Nur. 2009. *Irigasi Dan Tata Guna Lahan*. PT Gramedia. Jakarta.
- Riska, R., & Hudaidah, H. (2021). Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Portugis dan Belanda. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 824-829.
- Susilo, A., & Isbandiyah, I. (20/18).Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403.
- Utama, I. V. (2019). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Pengendalian Pelayanan Publik Pada Kantor Badan Pengelola *Indonesia dari Tahun 1830-1870*. *Jurnal artefak*. Hal 59- 66.